KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Istana: bagian dari demokrasi, tanggapi demo 27 Agustur
Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Tanggapi Demo 27 Agustus

Istana: Bagian Dari Demokrasi

ISTANA menanggapi demo besar yang akan berlangsung di beberapa titik di Jakarta, hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Istana memastikan, aksi tersebut sebagai bagian dari demokrasi yang memang memberikan ruang bagi rakyat menyampaikan aspirasi.

"Itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Qodari menegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat, saran, maupun masukan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

"Tentunya dalam koridor aturan yang berlaku," pesannya.

Setidaknya, ada 4 kelompok masyarakat yang berencana menggelar aksi di Jakarta.

Kelompok pertama adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Massa dari Pati, Jawa Tengah, ini membawa 2 tuntutan. Yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.

Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu mengatakan, pihaknya meminta DPR membuat pernyataan tertulis sebagai bukti komitmen untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut.

BERSAMBUNG KE HAL 6

VERSI DIGITAL ARTIKEL INI, SILAKAN SCAN QR CODE

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Puan Siap Temui Massa Yang Demo Di DPR

Istana; Bagian

... DARI HALAMAN 1

Kelompok kedua adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB). Koordinator Aksi AMDB Yusuf mengatakan, pihaknya membawa tiga tuntutan utama. Yakni mminta DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset, menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor, serta menurunkan harga kebutuhan pokok.

Ketiga, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram). Koordinator Aksi Geram Ahmad Mixel meminta pimpinan DPR hadir langsung menemui massa aksi.

"Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," pinta Mixel.

Setidaknya ada 10 tuntutan yang akan disuarakan Geram. Di antaranya meminta Pemerintah menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengubah kebijakan pajak yang dinilai membebani rakyat.

Kelompok terakhir, yakni Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4). Koordinator RMP4 Ali mengatakan salah satu program yang mereka dukung adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi rencana aksi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya siap menemui masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. DPR, kata Puan, selalu terbuka menerima berbagai masukan dari masyarakat.

Pimpinan DPR maupun pimpinan komisi disebut siap bertemu dengan perwakilan masyarakat yang ingin melakukan audiensi.

"Kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan, pimpinan komisi bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi. Secara bergantian, kami menemani masyarakat yang ingin bertemu," tutur Puan.

Puan menambahkan, setiap aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, ia berharap aksi demonstrasi dapat berlangsung tertib sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan personel di berbagai titik di Jakarta untuk mengawal aksi unjuk rasa. Kepolisian berkoordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam (pamdal) di berbagai titik, termasuk DPR dan instansi di area sekitar Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan Jakarta.

"Beberapa titik ini juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (26/8/2026).

Personel yang ditugaskan tidak hanya untuk mengawal aksi unjuk rasa, tetapi juga keperluan pengamanan lain sehingga jumlahnya akan lebih banyak dari massa aksi. Kendati demikian, Budi belum memerinci jumlah personel yang nantinya diturunkan.

Namun, Budi mengimbau masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Pihak kepolisian memastikan pengamanan disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah serta perkembangan situasi di lapangan.

"Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang bahwa situasi dan kondisi DKI Jakarta dalam kondisi aman dan kondusif," tegas Budi. ■ MEN